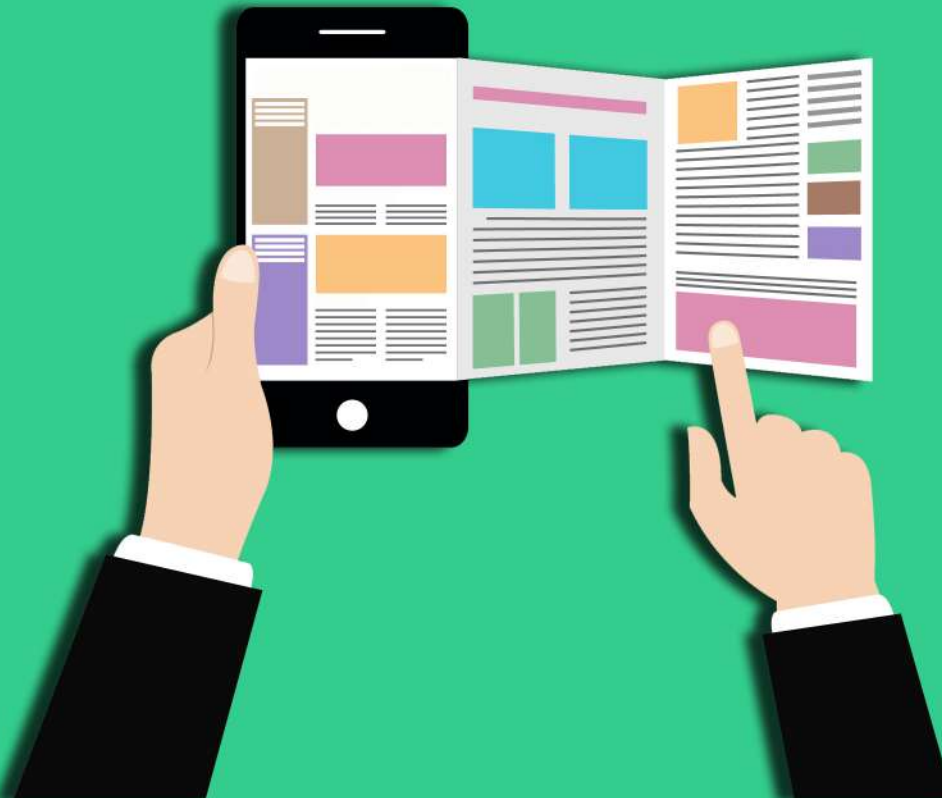




Kliping Digital

Agama dan Keagamaan

Rabu, 15 April 2020



**PERPUSTAKAAN BADAN LITBANG DAN DIKLAT
KEMENTERIAN AGAMA**



Pencatatan Nikah Kini Lewat Daring

GUNA menangkal penyebaran wabah virus korona (covid-19), Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat (Dirjen Bimas) Islam Kementerian Agama menghentikan layanan pencatatan nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) per 1 April 2020. Proses pendaftaran selanjutnya dibuka secara daring melalui *simkah.kemenag.go.id*.

Dirjen Bimas Islam Kemenag Kamaruddin Amin mengatakan kondisi ini tidak berarti layanan pencatatan dan akad nikah berhenti. "Layanan pencatatan dan akad terus berjalan untuk calon pengantin yang sudah mendaftar sebelum 1 April. Jadi, kami tidak menyelenggarakan layanan pernikahan bagi mereka yang terdaftar setelah 1 April," katanya, kemarin.

Dia menambahkan calon pengantin yang sudah mendaftar sebelum 1 April jumlahnya besar sehingga masih terjadi peristiwa nikah. Semisal para calon pengantin yang telah mendaftar sebelum 1 April di Jawa Timur saja terdapat 18 ribu pasangan dan di Sulawesi Selatan hampir dua ribu.

Pelayanan akad dan pencatatan nikah saat ini hanya dilakukan di KUA--tidak boleh di luar KUA--dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Aturan tersebut berlaku sampai dengan tertanganinya wabah covid-19 karena kebijakan tersebut menjadi bagian upaya pencegahan wabah.

Kamaruddin yang juga Plt Dirjen Pendidikan Islam Kemenag ini mengutarakan calon pengantin yang telah mendaftar setelah 1

April 2020 jumlahnya juga cukup banyak. Data *simkah.kemenag.go.id* mencatat, sampai sekarang sudah hampir 30 ribu catin yang mendaftar secara daring.

Jadi, pelayanan di KUA juga masih terus berjalan, meski secara daring diterapkan sejak 1 April lalu. "Kita berharap kondisi bisa segera normal sehingga masyarakat bisa menggelar akad nikah dalam suasana yang lebih meriah sebagaimana biasanya."

Untuk diketahui, Kemenag saat ini menerapkan sistem kerja dari rumah untuk pegawainya hingga 21 April 2020. Kepada jajaran di kanwil dan KUA, Kamaruddin meminta pegawai tetap memberikan pelayanan konsultasi dan informasi kepada masyarakat secara daring. (Bay/H-1)



Bolehkah Akad Nikah Secara Daring Saat Wabah?

■ OLEH RATNA AJENG TEJOMUKTI

Akad nikah di tengah wabah virus korona (Covid-19) memang agak sulit dilakukan. Kini, di Indonesia, KUA menerapkan aturan tentang pembatasan sosial ketika akad nikah, selain adanya pendaftaran secara daring untuk pencatatan sipil di KUA.

Namun, bagaimana jika tak sekadar pendaftaran daring, tetapi juga pernikahan yang dilakukan secara daring melalui panggilan video di berbagai layanan aplikasi? Apakah sah jika ijab kabul dilakukan di dua tempat yang berbeda dan hanya dipersatukan melalui aplikasi video?

Anggota Komisi Fatwa MUI Pusat, KH Aminudin Yakub, mengatakan, MUI belum mengeluarkan fatwa mengenai menikah secara daring. "Terdapat dua perbedaan pendapat ulama mengenai sah dan tidaknya pernikahan yang dilakukan secara daring ini," ujar dia saat menjadi pembicara dalam Dakwah Online MUI yang dilaksanakan melalui aplikasi Zoom, Kamis (9/4).

Dalam fikih kontemporer, kata dia, ada ulama yang telah membahas mengenai pernikahan daring, meski terdapat ikhtilaf (perbedaan pandangan).

Kiai Aminudin menjelaskan, dalam pernikahan terdapat rukun akad nikah. Salah satunya adalah ijab kabul yang diucapkan wali dari mempelai wanita dan dijawab oleh mempelai laki-laki. Para ulama dalam ijab kabul mensyaratkan harus menggunakan lafaz nikah.

"Tidak boleh menggunakan lafaz lain karena di dalam lafaz nikah terdapat ketentuan hukum dan ketika mengucapkan ijab harus

dilakukan secara bersambung tanpa jeda dengan kabul," ujar dia.

Syarat lain adalah ijab kabul harus dilakukan dalam satu majelis. Pada syarat tersebut ada pertanyaan, apakah satu majelis ini harus benar-benar dalam satu ruangan yang sama atau bisa berbeda tempat tapi dalam satu kondisi yang sama, misal sedang melakukan panggilan video, atau taklim yang dilakukan secara daring?

Kiai Aminudin menjelaskan lebih mendalam, bahwa ada ulama yang tegas melarang pernikahan dengan alat komunikasi ini karena pernikahan adalah akad yang sakral, bukan sekadar muamalah biasa. "Sehingga perlu dihadiri secara langsung kedua belah pihak di ruangan yang sama," ujar dia.

Namun, ulama yang lain membolehkan dengan syarat dalam kondisi darurat, seperti pasangan yang salah satunya harus diisolasi tetapi telah melakukan persiapan pernikahan. Atau salah satu dari pasangan calon pengantin terjebak di negara seperti Italia yang melakukan karantina wilayah (*lockdown*) sehingga tidak bisa pulang ke Indonesia, maka bisa melakukan pernikahan dengan panggilan video.

Berbeda jika pernikahan dilakukan dengan hanya menggunakan telepon seperti dalam pernikahan presiden keempat RI KH Abdurrahman Wahid. Sebagian ulama tidak membolehkan pernikahan seperti itu karena khawatir orang yang melakukan ijab kabul bukanlah orang yang dimaksud.

Namun, ada sebagian ulama yang membolehkan, dengan catatan kedua mempelai yakin dan tidak merasa ditipu oleh kedua pihak. ■ **ed:** wachidah handasah



Perhatikan Protokol Kesehatan Saat Pantau Hilal

PBNU gelar rukyatul hilal tertutup.

■ FUJI E PERMANA

JAKARTA – Di tengah pandemi virus korona (Covid-19), aktivitas memantau hilal (rukyatul hilal) awal Ramadhan 1441 H harus memperhatikan protokol kesehatan.

Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama (Kemenag) Mohammad Agus Salim mengatakan, persiapan rukyatul hilal setiap tahun sama. Namun, di tengah mewabahnya Covid-19, rukyatul hilal dan sidang itsbat Ramadhan dilaksanakan dengan cara berbeda.

"Rukyatul hilal tetap dilaksanakan di sekitar 80 titik pemantauan hilal di seluruh Indonesia, tapi saat melakukan pemantauan tetap menggunakan protokol kesehatan untuk mengantisipasi Covid-19," kata Agus kepada *Republika*, Selasa (14/4).

Ia menjelaskan, di tengah pandemi Covid-19, pemerintah tidak membolehkan adanya kerumunan karena mengantisipasi penyebaran virus. Oleh karena itu, rukyatul hilal dilaksanakan dengan membatasi

jumlah orang yang melakukan pemantauan.

Meski sedang terjadi pandemi Covid-19, dia mengatakan, rukyatul hilal harus tetap dilaksanakan. Sebab, banyak umat Islam yang menunggu kejelasan tentang awal Ramadhan. Seusai rukyatul hilal, sidang itsbat akan digelar melalui telekonferensi.

"Kemenag tetap melibatkan semua pihak seperti ormas Islam, Majelis Ulama Indonesia (MUI), hakim-hakim di pengadilan agama dan yang lainnya," ujar Agus.

Mengenai sidang itsbat, Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat (Bimas) Islam Kemenag Kamaruddin Amin menyampaikan, Kemenag akan menggelar sidang itsbat penetapan awal Ramadhan pada 23 April 2020.

"Seiring kebijakan *physical distancing* dan sesuai protokol kesehatan, kita menghindari ada kerumunan, sidang itsbat akan memanfaatkan teknologi telekonferensi sehingga peserta dan media tidak perlu hadir di Kemenag," kata Kamaruddin melalui pesan tertulis kepada *Republika*, Selasa (14/4).

Ia menerangkan, masyarakat dapat menyaksikan proses sidang itsbat melalui *live streaming website* dan media sosial Kemenag. Sebagaimana biasa, sidang itsbat akan dibagi dalam tiga sesi. Pertama, paparan posisi hilal awal Ramadhan oleh anggota tim Falakiyah Kemenag. Paparan ini akan disiarkan secara *live streaming* melalui *website* dan media sosial Kemenag.

"Akan dibuka dialog, masyarakat dan media bisa mengikuti melalui *room meeting online* yang nanti akan dibagikan, tentu kuotanya juga terbatas," ujar dia.

Ia menjelaskan, setelah magrib, sidang itsbat digelar secara tertutup. Sidang ini hanya dihadiri secara fisik oleh perwakilan MUI, DPR, menteri agama, wakil menteri agama, dan dirjen Bimas Islam. Sidang diawali dengan pembacaan laporan olah direktur urusan agama Islam tentang hasil rukyatul hilal dari seluruh Indonesia. "Setelah mendengar laporan dan masukan dari ormas Islam, menteri agama akan me-netapkan awal Ramadhan 1441 Hijriyah," ujar Kamaruddin. Salah satu ormas Is-

lam yang akan melaksanakan pemantauan hilal awal Ramadhan 1441 H adalah Nahdlatul Ulama (NU). Wakil Ketua Lembaga Falakiyah PBNU Hendro Setyanto mengatakan, pihaknya akan tetap melakukan rukyatul hilal di beberapa titik meski tengah ada pandemi Covid-19. Pemantauan hilal tahun ini dilakukan secara tertutup, artinya jumlah orang dalam tim rukyatul hilal juga dibatasi.

"Ini untuk menghindari penyebaran wabah Covid-19, kita batasi orang yang melakukan rukyatul hilal sesedikit mungkin," kata Hendro.

Tahun lalu, kata dia, rukyatul hilal dilakukan di 100 lokasi. Tahun ini, karena sedang terjadi pandemi Covid-19, maka jumlah lokasi rukyatul hilal akan dikurangi. Misalnya, rukyatul hilal di Jakarta cukup di satu titik dan di Jawa Timur di beberapa titik saja. ■ ed: wachidah handasah



Zakat Reguler Ujung Tombak Hadapi Covid-19

■ ROSSY HANDAYANI

JAKARTA — Direktur Pendistribusian dan Pendayagunaan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Irfan Syauci Beik mengatakan, zakat yang bersifat reguler menjadi ujung tombak saat pandemi virus korona (Covid-19).

“Kita tidak tahu kapan ini akan berakhir. Orang boleh prediksi Mei puncaknya atau Juni, tapi sebenarnya kita *enggak* tahu sampai kapan, napasnya harus panjang. Dalam konteks perpanjangan, di samping percepatan juga sebenarnya zakat yang sifatnya reguler menjadi ujung tombak,” kata Irfan kepada *Republika*, Senin (13/4).

Zakat yang bersifat reguler yakni zakat profesi, dalam hal ini para muzaki biasa mengeluarkannya setiap bulan. Sementara, zakat harta membutuhkan jangka waktu hingga satu tahun pengumpulan.

Irfan berharap para muzaki dapat memberikan zakat, infak, dan sedekahnya (ZIS) selama masa pandemi ini. Sebab, hal ini juga akan memberikan dampak positif, tidak hanya bagi mustahik tetapi juga bagi muzaki.

“Paling tidak, ini akan menimbulkan optimisme bagi yang mengeluarkan zakat, infak, sedekah, dan secara mental membuat semakin kuat, ada hal positif yang kita bangun, dan daya tahan mentalitas sangat penting dalam menghadapi pandemi,” kata Irfan.

Baznas juga mendorong ZIS melalui platform digital karena saat ini orang sudah tidak lagi membayarkannya secara manual.

Sementara, Direktur Pemberdayaan Zakat dan Wakaf Kementerian Agama (Kemenag) M Fuad Nasar mengatakan, ZIS dan dana sosial keagamaan lainnya yang dikelola organisasi pengelola zakat seperti Baznas dan lembaga amil zakat (LAZ) telah banyak membantu masyarakat, khususnya di tengah pandemi Covid-19.

Ia mengibaratkan organisasi pengelola zakat seperti *shelter* kemanusiaan di tengah kondisi wabah. “Baznas dan LAZ membantu negara dalam memperjuangkan kesejahteraan rakyat,” ujar dia.

Di tengah wabah Covid-19, Baznas dan LAZ telah memberikan bantuan, antara lain berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) untuk tenaga medis, pembagian masker, hand sanitizer, penyemprotan disinfektan di area publik, pembagian paket sembako dan makanan siap saji, dan edukasi kepada masyarakat. ■ **ed:** wachidah handasah



1,3 Juta Orang Berpotensi Mudik

■ RAHAYU SUBEKTI, ALKHALEDI

JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mencatat sebanyak 900 ribu orang pemudik dari Jabodetabek sudah berada di kampung halamannya masing-masing. Saat ini, 2,6 juta orang masih di wilayah perantauan tersebut. Ketua Umum Transportasi Indonesia (MTI), Agus Taufik Mulyono mengungkapkan, sekitar separuh dari jumlah perantau tersebut berpotensi akan mudik.

"Jadi, saat ini ada 1,3 juta orang yang dianggap masih ada potensi ingin mudik," kata Agus dalam konferensi video, Selasa (14/4). Menurut dia, separuhnya berpotensi tidak mudik karena ada aturan aparaturnya hinga-

ga PNS yang dilarang mudik.

Agus menjelaskan, 1,3 juta pemudik tersebut akan menyebar ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatra Selatan, dan Lampung. Untuk Jawa Barat, sebanyak 13 persen, Jawa Tengah dan Yogyakarta 41 persen, Jawa Timur 20 persen, serta Sumatra Selatan dan Lampung delapan persen.

"Inilah yang perlu dilihat dampak dari mudik, itu terutama di Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Jawa Barat," kata Agus.

Dia menilai, semua daerah tersebut nantinya berpotensi sebagai wilayah penularan baru jika mudik masih belum dilarang. Untuk itu, Agus mendesak pemerintah segera menangani

persoalan mudik selama pandemi virus korona atau Covid-19. Sebab, transportasi dan mobilitasi warga paling berpotensi menyebarkan wabah pandemi.

"Sektor transportasi dianggap sebagai penyebab prima dari penularan virus korona dari hal-hal kecil," kata Agus.

Hingga saat ini, pemerintah hanya mengimbau masyarakat agar tidak mudik, padahal sudah status darurat Covid-19. Agus mengatakan, selain regulasi yang mengikat larangan mudik, pemerintah juga harusnya menyediakan kompensasi agar mereka tak mudik.

Kebanyakan masyarakat yang berpotensi mudik karena sudah tidak memiliki pendapatan lagi di Jakarta dan sekitarnya.

"Menghadapi yang tidak ada pemasukan lagi hidup di Jakarta tentu bantuan langsung tunai (BLT) dan bahan pokok," kata Agus.

Bagi yang masih bersikeras mudik, Agus menyarankan pemerintah menyediakan kompensasi voucher komunikasi. Dengan begitu, masyarakat dapat memanfaatkan komunikasi jarak jauh, meski tidak melakukan mudik. "Itu (voucher komunikasi) lebih mudah dilakukan karena bisa dideteksi oleh teknologi, siapa saja orang yang ingin mudik dari nomor *handphone*-nya," kata Agus.

Hingga saat ini, pemudik sudah terdata di daerah masing-masing. Pemerintah Kabupaten Lebak, Banten mencatat ada

19.502 pemudik telah memasuki daerahnya sejak penetapan status keadaan darurat bencana Covid-19 hingga Ahad (12/4). Para pemudik tersebut merupakan masyarakat yang sebelumnya tinggal di wilayah zona merah Covid-19.

Juru Bicara Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Lebak Firman Rahmatullah menyebut para pemudik kebanyakan adalah masyarakat yang dirumahkan dari tempat kerjanya akibat wabah ini.

"Mereka ini adalah pemudik yang bekerja di perusahaan dan diistirahatkan, jadi dari pada hidup di tempat mereka kerja, mereka balik ke tempat orang tuanya atau keluarganya," kata Firman, Selasa (14/4).

Selain Lebak, 43.548 pemudik juga tercatat sudah memasuki Kabupaten Kuningan. Para pemudik tersebut juga mendominasi kasus Covid-19 yang terjadi di daerah tersebut.

"43.548 pemudik yang masuk itu menyebar ke 32 kecamatan yang ada di Kabupaten Kuningan," ujar Jubir Crisis Center Covid-19 Kuningan Agus Mauludin, kemarin.

Juru Bicara Covid-19 Kabupaten Ciamis dr Bayu Yudiawan mengatakan, jumlah orang yang migrasi ke Ciamis tercatat 26.642 orang. Sebanyak 16.518 di antaranya telah selesai menerapkan protokol isolasi mandiri dan dinyatakan selesai pemantauan. ■ lilisri handayani/bayu adji

p ed: ilham tirta

Kepala Desa Tidak Setuju Warga Mudik

Aspek budaya tak lagi jadi pertimbangan utama. Kesehatan jadi alasan utama kepala desa yang tak setuju warganya mudik ke desa.

JAKARTA, KOMPAS — Aspek kesehatan menjadi pertimbangan utama kepala desa dalam menyikapi perlu atau tidaknya mudik Lebaran tahun ini. Kepala desa juga mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan keamanan.

Atas pertimbangan itu, sebanyak 89,75 persen dari 3.931 kepala desa di 31 provinsi tidak setuju warganya mudik ke desa mereka pada Lebaran 2020. Jajak pendapat "Kepala Desa: Mudik di Tengah Pandemi Covid-19" yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi pada 10-12 April itu mengambil sampel secara acak dengan margin kesalahan 1,31 persen.

Namun, kepala desa masih ragu menerapkan kebijakan larangan mudik atau imbauan agar warganya tidak mudik selama pandemi Covid-19.

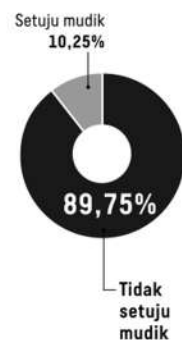
Kepala Pusat Data dan Informasi Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan Informasi Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi Ivanovich Agusta menyebutkan, 88,38 persen kepala desa yang tidak setuju dengan mudik Lebaran menempatkan kesehatan sebagai alasan utama. Aspek budaya tidak lagi jadi pertimbangan utama.

"Aspirasi kepala desa untuk tidak mudik ke desa pada Lebaran tahun 2020 perlu didengar warga desa yang merantau di kota," ujar Ivanovich dalam konferensi pers dalam jaringan di Jakarta, Selasa (14/4/2020).

Dari jajak pendapat itu, se-

Pandangan Kepala Desa terhadap Mudik

Dalam situasi negara saat ini, bagaimana pandangan kepala desa terhadap mudik ke desa?



Sumber: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi

■ Tidak setuju mudik ■ Setuju mudik

Alasannya?



INFOGRAFIK: ABUE

banyak 50,14 persen kepala desa mendukung kebijakan larangan mudik. Adapun 49,86 persen responden memilih menerapkan imbauan tidak mudik. "Masih ada keraguan kepala desa, apakah kebijakan sebaiknya imbauan mudik atau larangan mudik. Untuk itu, perlu keputusan lebih tegas pimpinan yang lebih tinggi," katanya.

Ivanovich menambahkan, keputusan lebih tegas itu berupa larangan mudik. Jika hanya sebatas imbauan, ada potensi 9 juta orang tetap mudik ke desa. Jika pemerintah tegas melarang

mudik, kepala desa tidak ragu untuk melarang warganya mudik. Namun, masih ada kendala berupa sikap yang belum sama antara provinsi, kabupaten, dan kota soal kebijakan mudik.

Setiap tahun, sekitar 23 juta warga kota mudik ke desa. "Konsekuensi larangan mudik, kehidupan migran di kota didukung pemerintah," lanjut Ivanovich.

Bantuan pemerintah Rp 600.000 per bulan selama tiga bulan sedikit di atas pendapatan masyarakat di garis kemiskinan, yaitu Rp 500.000 per

bulan. Sementara itu, uajarnya, rata-rata pendapatan di kota besar Rp 950.000 per bulan.

Larangan

Secara terpisah, Ketua Umum Masyarakat Transportasi Indonesia Agus Taufik Mul-yono dalam diskusi daring "Mudik Lebaran di Masa Pandemi Covid-19", Selasa (14/4), menyebutkan, dalam rapat dengan Kementerian Perhubungan sebelumnya, terungkap 900.000 orang sudah mudik.

"Masih ada 2,6 juta orang yang belum pulang," kata Agus.

Jumlah itu, antara lain, berdasarkan survei Kemenhub, yakni 56 persen dari 42.000 responden menyatakan tak akan mudik pada Lebaran kali ini. Dengan adanya larangan mudik bagi TNI, Polri, pegawai BUMN, dan aparatur sipil negara, separuh dari 2,6 juta orang itu masih berpotensi mudik. Sekitar 1,3 juta orang yang masih berpotensi mudik itu berasal dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.

"Ke mana mereka menyebar? Sebarannya ke Jawa Barat 13 persen, Jawa Tengah 33 persen, DI Yogyakarta 7,8 persen, dan Jawa Timur 20 persen. Ada juga ke Lampung dan Sumatera Selatan 8 persen," kata Agus.

Jika diberlakukan karantina 14 hari bagi yang nekat mudik, diperlukan kesiapan semua daerah. "Apakah wilayah sudah siap?" ujarnya.

Oleh karena itu, ia menyarankan agar imbauan tidak mudik diganti menjadi larangan mudik. (LKT/CAS/MZW)



Dampak Covid-19 Bagi BMT

BAGUS ARYO, Kepala Divisi Keuangan Mikro Syariah, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah

Sejak pemerintah mengumumkan secara resmi kasus positif Covid-19 pada 2 Maret 2020, kasus yang terkonfirmasi telah menyebar ke 32 provinsi di seluruh Indonesia. Data terkini telah terkonfirmasi 4.557 positif, 399 meninggal, dan 380 sembuh (13/4).

Pada level internasional yang dihearkankan oleh John Hopkins Coronavirus Resource Center menunjukkan, sudah 1.854.464 orang positif, meninggal 114.331, dan sembuh 435.074 (13/4). Melihat jumlah individu yang terdampak, tak salah Covid-19 sudah menjadi pandemi.

Dalam waktu beberapa pekan, bahkan mungkin hari akan muncul secara masif dampak sosial, ekonomi, dan politik di seantero dunia. Bila kita fokus pada level akar rumput, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) terkena pukulan terbesar.

Tidak dapat dimungkiri, UMKM merupakan sektor dominan dalam struktur ekonomi Indonesia. Terdapat 64 juta unit UMKM menyerap 117 juta tenaga kerja atau setara 94 persen dari total tenaga kerja (BPS, 2018).

UMKM pun harus menanggung dampak besar karena bergantung pada likuiditas harian (Hawariyuni dan Sakti, 2020). Sebagian besar UMKM ini dapat dikompromikan menjadi kelompok rentan miskin, akan menjadi miskin ketika terkena krisis dan bangkrut (Ascarya, 2020).

Namun, apakah hanya UMKM yang terdampak? Bagaimana dengan institusi keuangan mikro syariah yang mengucurkan pembiayaan ke UMKM? Artikel ini membedakan antara istilah lembaga keuangan mikro dan institusi keuangan mikro.

Lembaga keuangan mikro menjadi domain hukum di bawah UU No 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro. Lembaga keuangan mikro (syariah) yang dimaksud dalam UU tersebut berada dalam pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Sementara itu, institusi keuangan mikro (syariah) terdiri atas institusi yang berada di bawah pengawasan Kementerian Koperasi dan UKM, yaitu Koperasi/Unit Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah (KSPPS/USPPS).

Lalu, yang berada di bawah pengawasan OJK, yaitu lembaga keuangan mikro (syariah), yang berada di bawah pengawasan pemerintah daerah dan adat setempat, yaitu lumbung pith nagari (LPN) dan lembaga perkreditan desa (LPD).

Salah satu bentuk institusi keuangan mikro syariah (IKMS) adalah Baitul Maal wat Tamwil atau BMT yang melakukan intermediasi keuangan pada UMKM. Jumlahnya sangat signifikan di seluruh Indonesia, sekitar 5.500 institusi berdasarkan data tidak resmi.

Masih diperlukan usaha bersama Kemenkop UKM dan OJK untuk menghimpun data BMT menjadi lebih baik. BMT tumbuh dan dikembangkan masyarakat sebagai gerakan dakwah di bidang ekonomi. Sekaligus

sebagai *self-help* bagi umat Islam.

BMT selain berfungsi melakukan intermediasi keuangan juga intermediasi sosial atau peran pemberdayaan pada segmen ultra mikro. Umumnya, segmen ini masih dikategorikan *unbankable* sehingga memerlukan perlakuan khusus untuk menaikkan kelas.

Selain itu, dalam praktik di lapangan, BMT juga mengemban misi sosial (*baitul maal*) menghimpun *Zawaf* untuk pemberdayaan dan kesejahteraan mustahik. Unsur dakwah mengiringi pelaksanaan tugas keseharian BMT. Hubungan BMT dengan UMKM boleh dikatakan 'mesra'. Rata-rata BMT memberikan pembiayaan di kisaran Rp 10 juta sampai Rp 30 juta.

Kajian yang dilakukan KNEKS tahun 2019 menyimpulkan, sebagian besar pembiayaan ditujukan kepada UMKM.

Lalu bagaimana nasib BMT? Sejak resmi dinyatakan adanya positif Covid-19 sebulan lalu, sudah dirasakan beberapa dampak seperti yang diturunkan para pelaku ataupun pengurus BMT. Pertama, adanya *unintended consequences* dari pidato Presiden Joko Widodo.

Ketika mengumumkan keringanan kredit bagi masyarakat yang perekonomiannya terdampak pandemi Covid-19 pada Selasa (24/3), banyak anggota BMT, yang memiliki arus kas baik, meminta untuk menunda pembayaran angsuran.

Walaupun OJK mengeluarkan POJK No.11/POJK.03/2020 yang mengatur restrukturisasi kredit, aturan itu ditujukan bagi perbankan dan *leasing* bukan BMT.

Kedua, bermunculan di berbagai daerah adanya surat dari kepala desa atau aparat lokal terkait pelarangan penagihan angsuran atau cicilan ke warga mereka dan disertai penutupan beberapa tempat seperti pasar.

Akibatnya, *repayment rate* mengalami penurunan tajam.

Selain itu, penerapan *physical distancing* berdampak sulitnya BMT mengumpulkan anggota. Khususnya, BMT yang menerapkan pembiayaan kelompok. Tanpa pertemuan kelompok, angsuran pun 'libur'.

Ketiga, dari sisi keuangan secara umum. Sudah terjadi penarikan tabungan oleh anggota karena kebutuhan selama pandemi dan konsumsi yang meningkat untuk menjaga imunitas tubuh. Diperparah pekerja informal dan UMKM yang tidak bisa beraktivitas lagi.

Informasi yang diterima, dalam sebulan ada BMT yang mengalami penarikan tabungan sampai Rp 1 miliar. Angsuran pembiayaan mulai tersendat, khususnya UMKM, tetapi pekerja formal masih lancar sampai saat ini.

Hampir semua BMT melakukan *selective lending*. Pembiayaan diberikan kepada sektor yang tidak terkena dampak Covid-19 dan

pekerja di sektor formal seperti PNS. Pada sisi cadangan likuiditas, sudah terbatas untuk beberapa waktu ke depan.

Kondisi ini tidak sama antara satu BMT dan yang lain. Ada yang mampu bertahan untuk beberapa bulan ke depan, tetapi tak sedikit yang bertahan beberapa pekan saja akibat penarikan tabungan.

Kekhawatiran juga timbul pada bulan Ramadhan. Anggota BMT umumnya menarik tabungan untuk persiapan Idul Fitri. Secara umum, pendapatan BMT juga menurun selama pandemi ini. Keempat, pada aspek operasional. BMT mulai mengurangi hari dan jam kerja. Terakhir, menjaga moral dan kesehatan pegawai BMT dari Covid-19.

Solusi bagi BMT

BMT sebagai salah satu garda terdepan dalam penyaluran pembiayaan ke UMKM, memerlukan dukungan semua pihak. Ada dua solusi yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan BMT, solusi jangka pendek dan cepat.

Diperlukan bantuan likuiditas untuk mengatasi cadangan likuiditas yang semakin menipis. Diperlukan relaksasi bagi BMT yang mendapatkan pembiayaan dari perbankan ataupun lembaga keuangan nonbank lainnya.

Perlu jaring pengaman sosial atau *bansos* bagi anggota BMT yang kesulitan ekonomi karena pandemi. Dalam konteks ini, banyak anggota BMT atau UMKM yang menjadi *ghorimin* dan berhak menerima zakat.

Terakhir, adanya Satuan Tugas Penanganan Dampak Covid-19 pada Sektor Keuangan Mikro Syariah, yang terdiri atas seluruh otoritas terkait sektor keuangan mikro syariah ditambah asosiasi IKMS. Mereka bersama-sama merumuskan kebijakan yang dapat segera dieksekusi.

Solusi jangka menengah, pertama, adanya APEX sebagai *lender of the last resort* untuk mengantisipasi permasalahan likuiditas. Kedua, didirikan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) bagi keuangan mikro untuk menjaga tabungan anggota saat krisis dan menaikkan reputasi BMT.

Ketiga, pengawasan dan pelaporan yang efektif bagi BMT, sebagai upaya menjaga kehati-hatian dan *risk tolerance*. Keempat, perubahan model bisnis yang mengarah pada pembentukan ekosistem digital.

Sedangkan kelima, penerapan *human touch and technology*, bukan sekadar digitalisasi untuk meningkatkan aspek bisnis, melainkan juga mempertahankan kedekatan emosional dengan anggota. Kehadiran BMT memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terlebih bagi pelaku UMKM. Kebijakan dan intervensi yang tepat dan cepat dapat mencegah bertumbuhnya BMT. ■



HIKMAH

■ OLEH FAJAR KURNIANTO

Hidup Optimistis

Hidup manusia tak selamanya baik, enak, dan menyenangkan. Pada suatu ketika, manusia pasti akan menghadapi kesulitan atau hal-hal yang rasanya tak menyenangkan. Allah memang sudah menetapkan bahwa begitulah kehidupan di dunia, ada senang ada susah, ada gembira ada sedih, dan seterusnya. Namun, dunia bukanlah tempat yang abadi. Tak ada kegembiraan yang abadi, begitu juga tidak ada kesedihan yang abadi. Kehidupan berjalan terus dengan dinamika dan ceritanya.

Setelah sekian waktu kehidupan kita menyenangkan dan bebas, tiba-tiba hari-hari ini berubah menjadi menyedihkan dan terbatas. Pandemi yang menyebar hampir ke seluruh dunia membuat kita mesti membatasi diri dari berinteraksi dengan orang lain dan diharuskan untuk tetap di rumah serta menjauh dan tidak membuat

kerumunan. Tempat-tempat yang tadinya ramai berubah menjadi sepi. Jalanan yang tadinya macet, kini lengang. Polusi udara pun berkurang drastis. Bumi seperti bisa bernapas panjang dan bebas.

Dalam hidup yang serbaterbatas atau dibatasi seperti sekarang, ada sebagian dari kita merasa sedih dan galau, bahkan putus asa. Selain karena keterbatasan yang terasa menyiksa dan membosankan, ada ancaman virus yang tak kita ketahui dari siapa atau apa tiba-tiba mengenai kita dan membuat kita sakit. Bukan hanya kita, orang-orang tercinta kita, keluarga, kerabat, anak-anak, orang tua, saudara, tetangga bisa jadi tertular ketika terjadi kontak fisik. Kita seperti hidup pada masa yang gelap dan situasi yang sulit. Kita, makhluk sosial, untuk sementara waktu mesti membatasi interaksi.

Segala sesuatu atau kejadian apa pun

selain ada sebab dan akibat juga ada hikmah, ibrah, atau pelajaran penting. Tinggal kita yang mengambilnya hingga tak mengulangi kesalahan yang sama, atau justru mengabaikannya hingga kita kembali melakukan kesalahan yang sama.

Selain itu, di saat seperti ini, kita mesti tetap optimistis bahwa tak ada kesulitan yang abadi. Cepat atau lambat, ia pasti akan berakhir bila kita meyakinkannya. Keyakinan tentu saja tak cukup, perlu doa dan ikhtiar dengan mengikuti anjuran dan arahan dari otoritas kesehatan (bagian dari *util amri*), karena ini adalah wabah penyakit.

Sikap pesimistis hanya membuat kita semakin tersiksa dan mungkin akan berbuat nekat sehingga bisa mencelakakan tak hanya diri sendiri, tetapi juga orang lain. Allah berfirman, "Dan apabila Kami rasakan sesuatu rahmat

kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Dan apabila mereka ditimpa sesuatu musibah (bahaya) disebabkan kesalahan yang telah dikerjakan oleh tangan mereka sendiri, tiba-tiba mereka itu berputus asa." (QS ar-Rum [30]: 36).

Ibnu Katsir dalam *Tafsir al-Qur'an al-Azhim* menjelaskan, melalui ayat-ayat ini Allah mengabarkan kepada kita tentang manusia dan sifat-sifat tercela dalam diri mereka. Yakni, apabila mereka ditimpa kesulitan dan musibah, setelah sebelumnya mereka mendapatkan rahmat, maka mereka bersikap putus asa dan pesimistis untuk mendapatkan hal serupa pada masa akan datang. Mereka tidak mensyukuri rahmat yang diberikan Allah sebelumnya, seolah-olah mereka merasa bahwa mereka tidak pernah diberi rahmat itu sebelumnya. *Wallahu a'lam*. ■